

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin krusial di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan volume timbulan sampah, tetapi juga dengan keterbatasan kapasitas sistem pengelolaan yang tersedia. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari *Satu Data Ponorogo (SADAP)* yang diunggah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, total timbulan sampah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 mencapai 140.087 ton per tahun (Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, 2024a). Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 35,2% sampah yang berhasil dikelola, sedangkan sisanya masih belum tertangani secara optimal (Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, 2024b). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan sistem pengelolaan sampah yang ada. Selain itu, data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo juga menunjukkan bahwa ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih terbatas, yaitu sebanyak 31 TPS dengan total daya tampung sekitar 148,8 ton, sehingga belum mampu mengakomodasi peningkatan timbulan sampah harian secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo (Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, 2024c). Keterbatasan ini berdampak pada pengelolaan sampah yang masih didominasi oleh sistem kumpul-angkut-buang di Tempat Pembuangan Akhir, tanpa diimbangi dengan pengurangan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya.

Situasi ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat, khususnya dipedesaan untuk membuang sampah rumah tangga tanpa memilah akibatnya sampah organik yang tercampur dengan sampah anorganik. Dampaknya tidak hanya berupa penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan, tetapi juga belum optimalnya pemanfaatan nilai ekonomi sampah yang seharusnya dapat dikelola secara produktif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Rendahnya literasi lingkungan dan kebiasaan membuang sampah tanpa memilah dari sumbernya menunjukkan lemahnya tanggung jawab individu terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis seperti pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial berupa perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat agar memiliki kesadaran ekologis yang berkelanjutan (Nggilu et al., 2020).

Pengelolaan limbah di kawasan pedesaan masih dihadapkan pada beragam kendala, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta belum kuatnya lembaga pengelolaan. Sampah rumah tangga yang tidak ditangani secara memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, sekaligus berpengaruh pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai barang yang tidak bernilai menyebabkan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di pedesaan membutuhkan pendekatan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelembagaan desa (Isa & Mansyur, 2021).

Pengelolaan sampah berkelanjutan menekankan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya (*source reduction*), pemanfaatan kembali (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*) untuk mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Konsep ini selaras dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Menurut (Sulthoni, Muhammad A.D.N, Badruzaufari, Yusran, Fadli and Pujawati, 2021). strategi pengelolaan sampah berkelanjutan harus diiringi dengan pendekatan edukatif, kemitraan antar-aktor, dan penguatan kelembagaan desa. Tanpa perubahan paradigma masyarakat, upaya teknis semata tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan pada tingkat desa merupakan langkah strategis, melibatkan partisipasi masyarakat serta berorientasi pada

keberlanjutan lingkungan (Luluatul Musyarofah, Ulfa Syafa'ah, Qistontiyah Zamrud, Ambar Mustikarini, 2023)

Salah satu bentuk inovasi pengelolaan sampah yang berkembang di berbagai wilayah yaitu Bank Sampah, lembaga yang berbasis masyarakat yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan nilai ekonomi. Menurut (Sarry & Utama, 2023) menyatakan bahwa melalui mekanisme pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, bank sampah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi dari hasil penjualannya. (Sudiyanto & HS, 2025) menjelaskan bahwa bank sampah berfungsi sebagai media edukasi lingkungan sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana aktivitas pengelolaan sampah diarahkan menjadi kegiatan produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Melalui pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama menjadikan bank sampah tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai gotong royong serta ruang kolaboratif yang mempertemukan masyarakat, pemerintah desa, dan sektor swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka kelembagaan desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang posisi penting sebagai aktor strategis yang berperan dalam menopang dan mengembangkan pengelolaan bank sampah. Dalam konteks kelembagaan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan bank sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola dan mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendorong aktivitas ekonomi, BUMDes juga memberdayakan warga dengan mengelola beragam unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan termasuk usaha di sektor lingkungan. (Perekonomian et al., 2024). menegaskan bahwa efektivitas BUMDes bergantung pada tata kelola yang transparan, penguatan sumber daya manusia, serta kemitraan dengan berbagai pihak

eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah mendorong penguatan fungsi kelembagaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes sebagai instrumen ekonomi desa, tetapi juga diharapkan mampu merespon berbagai persoalan sosial di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan sampah. Keberadaan BUMDes menjadi strategis Karena didukung oleh legitimasi kelembagaan, landasan regulasi, serta kedekatan dengan masyarakat desa, sehingga memiliki potensi besar dalam mengelola program-program pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan (Fitriani & Idris, 2025).

Salah satu contoh penerapan pengelolaan berbasis BUMDes terdapat di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, melalui pembentukan Bank Sampah Mahesajenar. Lembaga ini mulai beroperasi pada akhir tahun 2021 dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sebagai respons terhadap masalah sampah yang semakin meningkat di desa tersebut. Untuk pelaksanaannya, Bank Sampah Mahesajenar menerima bimbingan kelembagaan, bantuan teknis dalam pengelolaan sampah, dan fasilitas operasional yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Desa. Komitmen Pemerintah Desa Plosojenar terhadap pengelolaan lingkungan juga tercermin dalam pengesahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan dasar hukum untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan partisipatif. Peraturan ini mengatur partisipasi masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga desa, termasuk BUMD, dalam mencapai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keterlibatan BUMDes Mahesajenar dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar didasarkan pada kerangka hukum Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, administrasi, dan pembubaran BUMDes Mahesajenar, yang memberikan wewenang kepada BUMDes untuk mengelola berbagai unit usaha desa, termasuk sektor pengelolaan sampah. Melalui pengelolaan sampah Mahesajenar, BUMDes berperan dalam memperkuat

kelembagaan, mengelola manajemen keuangan, serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satu bentuk inovasi yang diinisiasi adalah kerjasama dengan PT Pengadaian melalui program tabungan emas berbasis sampah, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk menukarkan sampah anorganik dengan saldo tabungan emas. Program ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat karena tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah dan BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan sampah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi desa. (Mudviyadi, 2021) membuktikan bahwa bank sampah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan menabung sampah dan pengelolaan limbah bernilai ekonomi, namun kajian tersebut belum menelaah secara mendalam aspek tata kelola kelembagaan dan keberlanjutan program. Penelitian (Maryana et al., 2025) menyoroti peran BUMDes dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi dan bank sampah yang berdampak pada peningkatan kebersihan lingkungan dan pendapatan warga, tetapi fokus kajiannya lebih pada aspek teknis pengolahan sampah dan belum mengkaji secara komprehensif mekanisme tata kelola, pembagian peran aktor, serta pola kemitraan yang menopang keberlangsungan program.

Sejumlah penelitian lain mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan bank sampah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat. (Latib Satar & Al Fariqi, 2022) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kemitraan eksternal menjadi faktor penghambat efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi. Temuan serupa juga diungkap oleh (Widyastuti et al., 2024) yang menunjukkan stagnasi bank sampah akibat minimnya inovasi program dan orientasi ekonomi jangka pendek masyarakat. Sementara itu, (Widyantika et al., 2022) menegaskan bahwa tata kelola bank sampah yang belum optimal, ketergantungan pada harga pasar, serta kapasitas pengurus yang terbatas berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain et al., 2022) mengeksplorasi pengembangan kegiatan BUMDes di Tambakromo dengan bank sampah sebagai unit usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan desa. Bank sampah bekerja dalam pengumpulan dan pemilahan, serta berkontribusi terhadap ekonomi lokal.

Penelitian yang dilakukan (Ruyadi & , Katiah , Sri Subekti, 2021) mengkaji pengaruh pengelolaan sampah berbasis bank sampah terhadap peningkatan pendapatan kelompok keluarga miskin. Studi ini menyoroti kendala kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kebutuhan peningkatan keterampilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Iqbal & Rosdiana, 2025) menyoroti aspek pemberdayaan masyarakat dan modal sosial yang mendukung keberlanjutan bank sampah. (Imaaduddin & Husin, 2023) menunjukkan bahwa pembentukan bank sampah berbasis komunitas di Tanjungpinang mampu mengubah sampah menjadi sumber ekonomi yang membantu peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. (Nugroho et al., 2025) menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan bank sampah dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan bank sampah.

Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan berbagai kendala dalam pengelolaan bank sampah, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas pengurus, serta ketergantungan pada harga pasar (Silfiah et al., 2021). Upaya penguatan melalui digitalisasi dan pelatihan, sebagaimana dikemukakan oleh (Perekonomian et al., 2024), menunjukkan potensi peningkatan kinerja BUMDes, namun kajian tersebut masih berfokus pada aspek penguatan kapasitas dan belum mengaitkannya secara langsung dengan tata kelola pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu cenderung memfokuskan analisis pada capaian program maupun aspek teknis pengelolaan sampah, sementara pembahasan mengenai tata kelola pengelolaan sampah oleh BUMDes melalui bank sampah masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sehubungan dengan hal tersebut,

penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya dengan menjadikan tata kelola sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini menganalisis peran BUMDes sebagai pengelola sentral dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan bank sampah, serta keterkaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk inovasi kemitraan antara BUMDes dan pihak eksternal, khususnya kerja sama dengan PT Pegadaian melalui program tabungan emas berbasis sampah, yang masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu.

Pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat serta dukungan dari pemerintah desa, tetapi juga menempatkan BUMDes Mahesajenar sebagai salah satu aktor kunci, terutama dalam penguatan aspek kelembagaan dan ekonomi yang menunjang keberlangsungan operasional bank sampah. Keterlibatan BUMDes tersebut didukung oleh landasan hukum yang jelas, yakni Peraturan Desa (Perdes) Plosojenar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, regulasi tersebut secara tegas mengatur legalitas keberadaan BUMDes Mahesajenar memperoleh legitimasi untuk mengelola berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, termasuk unit usaha yang berorientasi pada lingkungan seperti bank sampah. Peraturan Desa tersebut juga memberikan kewenangan yang jelas kepada BUMDes dalam mengatur manajemen internal, melalui proses perekrutan tenaga kerja lokal pengelolaan keuangan usaha, hingga pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak eksternal, baik dari unsur pemerintahan maupun sektor swasta.

Selain menghasilkan nilai ekonomi, aktivitas bank sampah di Desa Plosojenar turut menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Saat ini terdapat enam tenaga kerja yang terlibat dalam pemilahan sampah di bank sampah. Para pekerja memperoleh pelatihan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difasilitasi oleh puskesmas, serta mendapatkan penyuluhan secara berkala dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai teknik pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Pola kolaborasi lintas



sektor ini menunjukkan adanya sinergi antara aktor internal desa, seperti pemerintahan desa dan BUMDes, sebagai aktor eksternal, termasuk instansi kesehatan dan pihak swasta. Kolaborasi tersebut berkontribusi dalam memperkuat aspek sosial pengelolaan sampah sekaligus merefleksikan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada tingkat desa.

Praktik pengelolaan sampah di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan program, derajat keterlibatan masyarakat, serta kemampuan kelembagaan. Sejumlah inisiatif bank sampah belum mampu berkembang secara optimal, bahkan sebagian mengalami penghentian aktivitas, yang dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan, sistem pengelolaan yang belum memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran lingkungan di masyarakat. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek teknis dan ekonomi dari kegiatan bank sampah, sementara dimensi kelembagaan dan tata kelola, khususnya yang melibatkan peran BUMDes, belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, peran BUMDes sebagai lembaga yang memiliki legitimasi formal dan kapasitas ekonomi sangat potensial dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat desa.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji Tata kelola sampah oleh BUMDes melalui bank sampah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Fokus penelitian mencakup analisis terhadap mekanisme pengelolaan bank sampah, dinamika kelembagaan, pola kemitraan antaraktor, serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi pembangunan desa yang mandiri, bersih, dan berkelanjutan.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata kelola pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes Mahesajenar melalui Bank Sampah Mahesajenar di Desa Plosojenar?
2. Bagaimana kontribusi pengelolaan sampah oleh BUMDes melalui Bank Sampah Mahesajenar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Plosojenar?
3. Bagaimana upaya BUMDes Mahesajenar dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola Bank Sampah Mahesajenar?
4. Bagaimana bentuk kerja sama dan hubungan antar aktor (BUMDes, pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan masyarakat) dalam tata kelola pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Mahesajenar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes Mahesajenar melalui Bank Sampah Mahesajenar di Desa Plosojenar.
2. Untuk menganalisis kontribusi pengelolaan sampah oleh BUMDes melalui Bank Sampah Mahesajenar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Plosojenar.
3. Untuk mengetahui upaya BUMDes Mahesajenar dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia pengelola Bank Sampah Mahesajenar.
4. Untuk menganalisis bentuk kerja sama dan hubungan antar aktor, baik antara BUMDes, pemerintah desa, pengelola bank sampah, maupun masyarakat, dalam tata kelola pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Mahesajenar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder, khususnya bagi peneliti sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun

bentuk manfaat yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperluas kajian mengenai tata kelola kelembagaan desa, terutama terkait peran BUMDes dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat. Melalui analisis terhadap praktik yang dijalankan oleh BUMDes Mahesajenar mulai dari penciptaan iklim yang mendukung, pembukaan ruang partisipasi publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga penyediaan dukungan fasilitas, pembiayaan, dan kemitraan. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang lebih utuh mengenai hubungan antara BUMDes dan program bank sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini juga mampu memperluas pemahaman akademik mengenai dinamika kelembagaan dan praktik kolaboratif dalam pengelolaan sampah. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan untuk pengembangan model tentang bagaimana BUMDes berperan sebagai aktor strategis yang menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Plosojenar dan BUMDes Mahesajenar dalam memahami tingkat efektivitas peran BUMDes dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar. Analisis yang disajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek yang telah berjalan efektif maupun yang memerlukan penguatan, seperti pembukaan akses partisipatif masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan prinsip keadilan bagi kelompok rentan, dan ketercukupan fasilitas serta dukungan pembiayaan.

b. Bagi Pengelola Bank Sampah Mahesajenar

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bentuk dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas keterlibatan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan operasional bank sampah melalui pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang potensi kemitraan strategis yang dapat dikembangkan bersama BUMDes maupun pihak eksternal untuk memperkuat program pengelolaan sampah di tingkat desa.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran kelembagaan desa dalam membangun ruang kerja sama yang mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan pemahaman terhadap fungsi BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan bank sampah sebagai sarana bernilai ekonomi dan ekologis, serta berkontribusi secara berkelanjutan dalam proses pembangunan desa.

## **E. Penegasan Istilah**

Bagian ini memuat penjelasan mengenai istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Pemberian definisi terhadap setiap istilah dilakukan untuk memastikan kejelasan makna dalam konteks pembahasan penelitian.

1. Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) merupakan konsep yang merujuk pada cara suatu organisasi atau lembaga diatur, dikelola, dan dikendalikan melalui seperangkat prinsip, mekanisme, serta hubungan antaraktor yang terlibat di dalamnya. Konsep ini tidak hanya berfokus pada dimensi struktural dan mekanisme formal, melainkan juga menempatkan nilai-nilai normatif seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, efektivitas, dan keadilan sebagai prinsip utama. Dalam ranah pemerintahan

dan institusi publik, tata kelola dipahami sebagai serangkaian upaya untuk menjamin bahwa proses perumusan keputusan serta implementasi kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan inklusif dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola berperan sebagai kerangka konseptual yang mengatur pola interaksi antara aktor, masyarakat, dan sektore ekonomi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan (Widiastuti et al., 2019).

Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tata kelola memiliki posisi yang strategis mengingat BUMDes berfungsi sebagai entitas ekonomi sekaligus institusional yang berlandaskan kepentingan masyarakat desa. Penerapan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance memungkinkan BUMDes mengelola kegiatan usahanya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai pemberdayaan masyarakat serta prinsip keadilan sosial. Kejelasan tata kelola berfungsi untuk menata pembagian fungsi dan tanggung jawab, dengan pemerintah desa berperan sebagai pembina, pengurus BUMDes sebagai pelaksana kegiatan operasional, dan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pihak yang memperoleh manfaat. Di samping itu, tata kelola yang berjalan secara efektif menjadi sarana pengendalian dan penilaian kinerja agar seluruh aktivitas BUMDes tetap sejalan dengan arah pembangunan desa serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai fondasi kelembagaan dalam memperkuat kinerja dan legitimasi BUMDes di tingkat desa (Didiek R Mawardi, 2025)

## 2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa,

dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Menurut (Khairina et al., 2025) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai entitas ekonomi yang berbadan hukum untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya melalui optimalisasi potensi lokal desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam prktiknya BUMDes berperan penting sebagai implementasi ekonomi kreatif yang tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga mendorong kemandirian desa tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Melalui berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, tabungan, pengelolaan pasar desa, hingga kredit produktif dan konsumtif, BUMDes mampu menyediakan layanan keuangan dan ekonomi yang menjangkau masyarakat secara luas. Keberadaan BUMDes tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai sosial dan budaya desa, sehingga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan(Saputra, 2022).

Pembangunan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memerlukan informasi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan konteks mengenai karakteristik daerah, khususnya kondisi sosial budaya masyarakat dan potensi pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai badan usaha yang dibangun oleh masyarakat dan berlandaskan pada prinsip kemandirian, BUMDes harus mengutamakan sumber modalnya dari masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Meskipun demikian, modal dari eksternal, seperti dukungan dana dari pemerintah tingkat kabupaten, lembaga lain, atau pinjaman pihak ketiga tetap menjadi pilihan yang layak, asalkan sejalan dengan peraturan perundang-undangan (Sarry & Utama, 2023). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas, yaitu menyediakan layanan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, khususnya di kalangan kelompok masyarakat desa yang kurang mampu dan untuk mendorong kesempatan usaha yang adil, dan meningkatkan pendapatan tingkat desa. BUMDes

diharapkan dapat menumbuhkan budaya menabung di masyarakat, sehingga berkontribusi pada kemajuan pembangunan ekonomi daerah yang mandiri (Ridlwan, 2021).

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dijabarkan secara jelas agar dapat dipahami dan dimaknai secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, penyerta modal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, serta masyarakat desa (Samjulaifi, Muhammadiyah, 2022). Terdapat enam prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengelolaan BUMDes.

a. Kooperatif

Seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dituntut untuk menjalin kerja sama yang harmonis guna mendukung keberlangsungan dan pengembangan unit usaha desa.

b. Partisipatif

Setiap pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun mitra usaha, diharapkan berkontribusi secara aktif dan sukarela dalam mendukung kegiatan BUMDes.

c. Emansipatif

Pengelolaan BUMDes harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, di mana semua pihak diperlakukan tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, golongan, atau latar belakang sosial lainnya.

d. Transparan

Setiap aktivitas dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha BUMDes wajib dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

f. Sustainable

Usaha yang dijalankan BUMDes harus memiliki orientasi jangka panjang dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.

Pada akhirnya, BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen modal sosial yang menjembatani desa dengan sistem perekonomian yang lebih luas, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi di tingkat pedesaan. Untuk mewujudkan peran strategis tersebut, diperlukan serangkaian upaya yang dirancang secara terarah, baik pada tataran perencanaan strategis maupun operasional, terutama dalam menyinergikan potensi lokal, dinamika permintaan pasar, dan desain kelembagaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa yang menyeluruh. Di samping itu, perhatian terhadap kekhasan lokal serta dukungan kebijakan dari pemerintah pada level yang lebih tinggi menjadi faktor penting sebagai bentuk komitmen politik guna mengatasi rendahnya surplus ekonomi desa yang disebabkan oleh stagnasi atau keterbatasan pertumbuhan sektor ekonomi perdesaan.

3. Bank Sampah

Bank sampah merupakan bentuk nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi isu lingkungan yang kompleks. Konsep dasar dari pembentukan bank sampah ini dari gagasan untuk mengelola sampah, terutama sampah yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, agar dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Melalui mekanisme ini, bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah yang efektif, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Prasetyo et al., 2020).

Bank sampah dipandang sebagai instrumen yang efektif dalam penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) pada pengelolaan sampah yang berlandaskan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini



dirancang dengan mengoptimalkan mekanisme insentif ekonomi sebagai sarana untuk menstimulasi perubahan perilaku warga, terutama dalam aktivitas pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Secara operasional, kegiatan bank sampah berfokus pada tiga dimensi utama, yakni upaya menekan jumlah timbulan sampah (Reduce), pemanfaatan kembali material sisa yang masih memiliki kegunaan (Reuse), serta proses pengolahan sampah menjadi produk baru yang memiliki fungsi dan nilai tambah (Recycle). Sampah yang memiliki nilai ekonomi, yakni sampah yang masih dapat dimanfaatkan atau diperdagangkan kembali, diposisikan sebagai komoditas yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. Di samping menjalankan fungsi sebagai lembaga pengumpulan dan pengelolaan sampah, bank sampah juga berperan sebagai media edukasi lingkungan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Peran edukatif tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan, pelatihan, serta pembiasaan dalam praktik pemilahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan (Masithoh et al., 2021).

Mekanisme operasional Bank Sampah Mahesajenar dimulai dari penyetoran sampah oleh masyarakat, yang kemudian ditimbang dan dicatat dalam sistem administrasi. Sampah selanjutnya dipilah menjadi organik dan anorganik untuk pengelolaan lebih lanjut, seperti dijadikan kompos atau barang daur ulang. Alur ini digambarkan secara visual pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1.1. Mekanime penyaluran bank sampah Mahesajenar

*Sumber: Data Primer*

#### 4. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat serta peningkatan kesadaran lingkungan secara kolektif. Pendekatan ini mengacu pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, mengoptimalkan penggunaan kembali, serta mendaur ulang material yang masih bernilai guna. Dalam konteks pedesaan, penerapan prinsip 3R tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, misalnya melalui aktivitas Bank Sampah (Nurhadi, Pratama, & Fauzi, 2021).

Selain itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di pedesaan harus mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, ketersediaan fasilitas pengelolaan yang memadai, serta dukungan kebijakan desa. Aspek edukasi dan kesadaran lingkungan juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang ramah lingkungan secara berkelanjutan (Ngadisalam et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan sampah di pedesaan tidak hanya ditujukan untuk pengurangan limbah, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya lingkungan yang berkelanjutan dan mandiri secara ekonomi.

#### 5. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat pada konteks pembangunan desa mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota komunitas desa. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, seperti upah dari pekerjaan, usaha agraris, perdagangan lokal, serta hasil dari unit usaha desa seperti BUMDes. BUMDes sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi desa memiliki kontribusi penting dalam

memperluas peluang pendapatan masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal desa yang produktif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pelaksanaan peran BUMDes yang berjalan secara optimal mampu meningkatkan pendapatan desa, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menekan tingkat kerentanan terhadap kemiskinan (Londa, 2020).

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi komunitas desa, karena secara langsung mencerminkan kemampuan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kapasitasnya untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di tingkat lokal. (Melathi et al., 2024).

Implementasi program desa yang terarah termasuk pengelolaan dana desa serta dukungan kelembagaan yang memadai terhadap BUMDes terbukti berkontribusi dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal. Temuan penelitian di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif, disertai pendampingan terhadap unit usaha desa, mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi pedesaan (Suindyah Dwiningwarni & Amrulloh, 2020).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rifqi Mudviyadi pada tahun 2021 dengan judul *“Peran Bank Sampah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Sampah Desa Sumberpoh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta menganalisis faktor-faktor (Ngadisalam et al., 2025) pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian serta wawancara mendalam yang melibatkan pengelola

BUMDes, pengurus Bank Sampah, Tokoh Masyarakat, dan warga desa yang berperan sebagai anggota atau nasabah. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai bahan dokumentasi, seperti laporan pertanggungjawaban BUMDes, arsip pemerintah desa, serta data pendukung yang bersumber dari instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank sampah Desa Sumberpoh memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat melalui mekanisme tabungan sampah, layanan pengangkutan, serta pemanfaatan limbah yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya menambah sumber pendapatan warga dan menciptakan peluang kerja, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat mulai membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh bank sampah (Mudviyadi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Alfiansyah pada tahun 2021 berjudul *“Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu”* bertujuan untuk menjelaskan peran BUMDes dalam pengelolaan sampah serta memahami dampak yang dirasakan masyarakat setelah diterapkannya teknologi insinerator dan komposter. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Rejeki Barokah memegang peran penting dalam penanganan permasalahan sampah dengan mengimplementasikan tiga strategi utama, yaitu pengolahan residu sampah yang tidak memiliki nilai guna melalui penggunaan insinerator, pengelolaan sampah organik dengan sistem komposter anerob, serta pengelolaan material yang dapat didaur ulang melalui skema bank sampah. Pelaksanaan program tersebut memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta menghasilkan manfaat ekonomi, antara lain penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum dilakukan pengujian laboratorium terhadap emisi insinerator untuk menjamin keamanan

lingkungan dan kesehatan, serta belum menggunakan insinerator tipe multiple chamber yang lebih ramah lingkungan (Alfiansyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latib Satar dan Bagus Al Fariqi pada tahun (2021) dengan judul *“Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”* bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan program BUMDes dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Melalui penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan BUMDes Wringintelu memberikan kontribusi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, salah satunya unit usaha produksi batako yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat efektivitas program tersebut masih tergolong terbatas, yang tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat, belum terjalinnya kerja sama dengan pihak eksternal, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan pemantauan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil usaha BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian warga, terbukti dari peningkatan kondisi ekonomi individu seperti mampu membiayai pendidikan dan kebutuhan rumah tangga. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya evaluasi sistematis terhadap program kerja, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum optimalnya peran BUMDes dalam menjalin kemitraan strategis (Latib Satar & Al Fariqi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Rossa Ilma Silfiah, Ali Mohtarom, dan Kuni Muqtaniyatul Ulum pada tahun (2021) dengan judul *“Digitalisasi Bank Sampah Dengan Penerapan Sistem Aplikasi Resik Di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”* bertujuan untuk mengenalkan digitalisasi pengelolaan bank sampah melalui penerapan aplikasi Resik pada Bank Sampah “Hasil Karya” di Desa Karangsono, Sukorejo, Pasuruan, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis community development yang meliputi tahapan koordinasi, sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi, dengan melibatkan

pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan penyedia aplikasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa aplikasi Resik mampu mendukung proses pencatatan transaksi, pengelolaan distribusi sampah, serta pelaporan tabungan sampah secara digital. Namun demikian, penerapan sistem digital tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terbatasnya literasi teknologi di kalangan pengurus dan nasabah, serta dominannya keterlibatan warga lanjut usia. Kelemahan utama terletak pada kurangnya keterlibatan generasi muda dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap manfaat digitalisasi (Silfiah et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Maryana, Anggayuh Priotomo Adisty, Rusdiana, Maya Puspita Dewi pada tahun (2025) dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes menempati posisi strategis dalam upaya penanganan persoalan sampah melalui penyelenggaraan program bank sampah. Program ini dijalankan melalui tahapan kegiatan yang sistematis, mulai dari sosialisasi kepada warga, proses penangkutan, penimbangan, hingga pencatatan sampah yang disetorkan. Mekanisme tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah dan mengonversikannya ke dalam bentuk tabungan. Pelaksanaan program bank sampah memberikan dampak positif, antara lain terciptanya lingkungan desa yang lebih bersih, menurunnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta adanya manfaat ekonomi bagi warga berupa tambahan penghasilan tahunan yang mencapai kurang lebih Rp 400.000 yang bahkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pajak. Meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, program ini berhasil menciptakan budaya baru dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada belum dilakukannya uji laboratorium terhadap emisi insinerator dan penggunaan teknologi insinerator yang belum optimal, sehingga masih menyisakan potensi dampak lingkungan dari pembakaran sampah (Maryana et al., 2025).



Penelitian yang dilakukan oleh Mita Widyastuti, Abdul Muis, dan Muhammad Yunus pada tahun (2024) dengan judul *“Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat: Antara Harapan dan Kenyataan”*, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas bank sampah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, serta menelaah kendala implementasinya di wilayah perdesaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Sampah Cipta Unggul Jaya yang telah beroperasi lebih dari satu dekade mengalami kondisi stagnan meskipun berada di bawah pengelolaan BUMDes. Masyarakat cenderung memandang bank sampah hanya dari aspek ekonomi, sehingga tingkat partisipasi warga menurun akibat adanya alternatif penjualan sampah secara langsung kepada pengepul yang menawarkan pembayaran tunai dengan harga lebih tinggi. Selain itu, rendahnya volume sampah di wilayah perdesaan menjadi faktor pembatas yang berdampak pada kecilnya nilai pendapatan dari tabungan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank sampah belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan maupun membangun komitmen jangka panjang masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan inovasi program, pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas manajemen yang lebih modern, serta penguatan kolaborasi antara wilayah desa dan perkotaan guna mewujudkan sinergi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan (Widyastuti et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ayu Widyantika, Suprpto, Fatkur Muin, Susilowati Rahayu pada tahun (2022) dengan judul *“Analisis Pengelolaan Bank Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Bank Sampah “Srikandi Berseri” yang dijalankan oleh BUMDes di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik snowball sampling, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah berperan dalam proses



pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik, yang selanjutnya dimanfaatkan melalui penjualan kembali maupun pengolahan menjadi produk bernilai tambah, seperti tas dan aksesoris kerajinan lainnya. Meskipun pengelolaannya telah mengacu pada prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban, upaya pengembangan bank sampah masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan pemahaman masyarakat, pola pikir yang belum sepenuhnya adaptif, serta minimnya dukungan pelatihan. Selain itu, tingkat keterlibatan warga belum merata dan aktivitas pengolahan kerajinan masih bersifat insidental atau hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Rencana pengembangan mencakup perluasan nasabah, optimalisasi kegiatan daur ulang, serta pembentukan home industry berbasis kerajinan sampah. Namun, tantangan utama masih berkisar pada minimnya literasi lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat (Widyantika et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Rivaly Tafsir Ulya & Nia Kurniasari pada tahun (2022) dengan judul *“Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah di Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi”* Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran bank sampah, memetakan aktor-aktor yang terlibat, serta menganalisis peran bank sampah dalam pengelolaan sampah di Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi kinerja BUMDes, tingkat kesadaran warga, kestabilan harga pasar, tata kelola bank sampah, serta efektifitas kegiatan sosialisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran paling dominan dalam proses pengelolaan sampah dijalankan bank sampah skrikandi dan bank sampah gatot kaca 10. Menunjukkan bahwa peran bank sampah sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan timbulan sampah, serta membangun sistem pengelolaan yang lebih terstruktur melalui mekanisme pemantauan harga, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi warga. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada belum meratanya implementasi bank sampah di seluruh wilayah desa dan adanya ketergantungan

pada harga pasar serta variabilitas pengelolaan antar pengurus (Tafsir Ulya & Kurniasari, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Perdana Wanti, Radhi Ariawan, dan Nur Wachid Adi Prasetya pada tahun (2024) dengan judul “Pelatihan Pengelolaan dan Pemilahan Sampah Pada BUMDes Banjarwaru Sejahtera Untuk Menunjang Kemandirian Masyarakat Desa Banjarwaru” Penelitian berbasis pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Banjarwaru melalui pelatihan pengelolaan dan pemilahan sampah yang dilaksanakan bersama BUMDes Banjarwaru Sejahtera. Menggunakan pendekatan partisipatif dan praktis, kegiatan ini melibatkan tahapan survei awal, sosialisasi, penyuluhan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pendampingan, serta evaluasi berkala. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, termasuk implementasi pemilahan sampah di rumah tangga, pemanfaatan ulang barang bekas, serta pengurangan penggunaan plastik. Selain itu, program ini juga berhasil membentuk kelompok pengelola sampah di bawah BUMDes, memperkenalkan bank sampah dan produksi kompos sebagai peluang ekonomi baru bagi warga. Kegiatan ini memperkuat peran BUMDes sebagai fasilitator sekaligus motor penggerak keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat desa. Namun demikian, tantangan dalam mengubah kebiasaan warga dan kebutuhan akan edukasi lanjutan masih menjadi catatan penting untuk pengembangan program di masa depan (Wanti et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Syamsir, Latifah Amir, Lili Nali Hidayah, dan Eko Nuriyatman pada tahun (2024) dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Desa*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, khususnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan pendampingan. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes terkait pentingnya pengelolaan asset desa, kepastian aspek

hukum dan regulasi, serta penerapan tata kelola dan manajemen usaha BUMDes secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes menempati posisi strategis sebagai pengintegrasikan produk lokal, penyedia kebutuhan masyarakat, penyelenggara layanan publik, serta penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan BUMDes dinilai berkontribusi dalam mempersingkat jalur distribusi, peningkatan pendapatan petani, dan mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum. Oleh karena itu, kegiatan ini merekomendasikan strategi peningkatan kinerja BUMDes melalui diversifikasi unit usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan, serta peningkatan edukasi hukum, agar BUMDes dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan (Perekonomian et al., 2024).

#### **G. Landasan Teori**

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul sebagai bentuk kritik terhadap pola pembangunan lama yang bersifat *top-down*, di mana masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima atau objek pembangunan. Pola tersebut dianggap kurang berhasil karena justru membuat masyarakat semakin bergantung pada pemerintah maupun pihak luar. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma pembangunan berbasis pemberdayaan (*empowerment-based development*) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, kemandirian, serta penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan (Habib, 2021).

Dalam perspektif teori pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses perubahan yang bersifat struktural sekaligus kultural, dimana individu dan kelompok didorong untuk memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan, serta arah pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Konsep pemberdayaan tidak terbatas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi semata,

tetapi juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seperti tumbuhnya kesadaran kritis, penguatan rasa percaya diri, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun dan mengelola organisasi secara mandiri (Chandra et al., 2025).

Grand theory yang menjadi dasar penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah Capability Approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari sejauh mana manusia memiliki kebebasan dan kemampuan (capabilities) untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam konteks pemberdayaan, pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai penyediaan bantuan material atau fasilitas ekonomi semata, melainkan harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitas diri, memperluas pilihan hidup, serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memperluas kebebasan masyarakat dalam mengakses sumber daya dan peluang yang tersedia (Iswahyudi & Naupal, 2024).

Salah satu *grand theory* yang berpengaruh dalam kajian pemberdayaan masyarakat adalah gagasan conscientization yang diperkenalkan oleh Paulo Freire, yang menempatkan kesadaran kritis sebagai elemen kunci dalam proses pemberdayaan. Paulo Freire menegaskan bahwa kondisi kemiskinan dan keterpinggiran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat keterbatasan individu, melainkan sebagai hasil dari struktur sosial yang dihadapi, mengidentifikasi ketimpangan dalam relasi kekuasaan, serta terdorong untuk melakukan aksi kolektif guna mentransformasi kondisi tersebut. Dengan demikian pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi struktural, kebijakan, dan perubahan sosial yang lebih luas (Chandra et al., 2025).

Untuk menghubungkan kerangka teori makro dengan teori empiris di lapangan, penelitian ini mengadopsi teori pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Suharto (2005). Teori ini dipilih karena memiliki karakter yang aplikatif serta sesuai dengan konteks pembangunan sosial di Indonesia. Menurut Suharto, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami melalui dua

perspektif utama, yaitu sebagai sebuah proses dan sebagai capaian akhir. Dalam perspektif proses, pemberdayaan dimaknai sebagai rangkaian upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya dan menentukan keputusan secara mandiri. Sementara itu, dalam perspektif tujuan pemberdayaan diarahkan pada terciptanya masyarakat yang memiliki daya, yang tercemin dari meningkatnya pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk keperluan analisis temuan, Suharto merumuskan empat indikator utama pemberdayaan masyarakat, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan dukungan (*supporting*). Pemungkinan merujuk pada upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipatif aktif masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah, termasuk kemudahan akses terhadap informasi, sumber permodalan, serta ruang keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Indikator penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan pengelola serta masyarakat yang terlibat. Perlindungan dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa kelompok masyarakat yang rentan tidak dibedakan dan tetap memperoleh perlakuan yang adil dalam seluruh proses pengelolaan sampah. Adapun dukungan mencakup penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, bimbingan teknis, serta pendampingan berkelanjutan yang dilakukan oleh BUMDes guna memastikan masyarakat mampu menjalankan peran sosial dan ekonomi secara optimal (Ramadani & Revida, 2022).

Suharto (2005) merumuskan empat indikator utama pemberdayaan yang menjadi fondasi teoritik dalam analisis ini, yaitu:

1. Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan (*enabling*) merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya potensi masyarakat. *Enabling* berkaitan sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan terbukanya akses, peluang, serta ruang keterlibatan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi

secara aktif dalam proses pembangunan. Pada tahap ini, praktik pemberdayaan difokuskan pada pengurangan berbagai kendala atau hambatan, baik bersifat structural maupun kultural, yang selama ini menghambat inisiatif masyarakat, seperti minimnya informasi, keterbatasan akses permodalan, serta adanya kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu pemungkinan berperan sebagai landasan awal yang mendorong masyarakat untuk mulai berperan, berinisiatif, dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

## 2. Penguatan (*Empowering*)

Penguatan (*empowering*) merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Penguatan bertujuan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya, memecahkan permasalahan, serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Bentuk penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam proses ini, peran pendamping bersifat fasilitatif, yaitu mendorong dialog, pertukaran pengalaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## 3. Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan (*protecting*) merupakan salah satu fungsi dalam pemberdayaan yang diarahkan untuk melindungi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah dari berbagai bentuk eksploitasi, dominasi, maupun ketidakadilan yang bersifat struktural. Upaya perlindungan ini bertujuan menciptakan kondisi persaingan yang lebih adil sekaligus mencegah terjadinya marginalisasi terhadap kelompok rentan. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan hak, terwujudnya keadilan sosial, serta adanya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang kurang berdaya

## 4. Dukungan (*Supporting*)

Dukungan (*supporting*) merupakan bentuk pendampingan dan keberpihakan nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini

mencakup penyediaan fasilitas, akses terhadap sumber daya, bimbingan teknis, serta perlindungan sosial agar masyarakat mampu menjalankan peran sosial dan ekonominya secara optimal. Supporting menegaskan bahwa pemberdayaan membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan lembaga pendukung untuk memastikan keberlanjutan proses pemberdayaan dan mencegah masyarakat kembali pada kondisi ketergantungan.

## H. Definisi Oprasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep tata kelola sampah dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam praktik pengelolaan Bank Sampah oleh BUMDes. Bagian ini tidak mengulang definisi teoritis, melainkan menetapkan batasan operasional berupa aspek, aktivitas, dan indikator konkret yang menjadi fokus pengamatan dan penggalian data di lapangan. Dengan demikian, definisi operasional berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi praktik tata kelola sampah serta bentuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BUMDes dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan dipahami sebagai prasyarat awal yang memungkinkan terselenggaranya tata kelola pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes. Variabel ini dianalisis melalui tingkat kesiapan kelembagaan serta sistem kerja yang menopang pelaksanaan pengelolaan sampah. Secara operasional, indikator kemungkinan mencakup keberadaan struktur organisasi Bank Sampah yang mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola, tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah seperti timbangan, fasilitas penyimpanan, dan peralatan penunjang lainnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme kerja Bank Sampah, serta adanya regulasi atau kebijakan desa yang menjadi landasan hukum dalam implementasi program. Data diperoleh melalui observasi lapangan, telaah dokumen, dan wawancara dengan pengelola serta aparat desa.



## 2. Penguatan (*Empowering*)

Penguatan dioperasionalkan sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Bank Sampah secara mandiri. Variabel ini diamati melalui praktik pembinaan dan pendampingan yang dilakukan BUMDes kepada masyarakat. Indikator operasional mencakup keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan pemilahan dan pengelolaan sampah, peningkatan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat, serta munculnya peran aktif kelompok atau tokoh lokal dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan Bank Sampah. Penguatan diidentifikasi melalui dokumentasi kegiatan, hasil pendampingan, dan wawancara mendalam dengan pengelola serta nasabah Bank Sampah.

## 3. Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan dioperasionalkan sebagai upaya memastikan bahwa tata kelola sampah melalui Bank Sampah memberikan manfaat yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat. Variabel ini diamati melalui keterbukaan akses keanggotaan Bank Sampah bagi berbagai kelompok masyarakat, penerapan prosedur kerja yang aman dalam pengelolaan sampah, transparansi dalam pengelolaan hasil dan keuangan Bank Sampah, serta adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelaksanaan program. Indikator ini diukur melalui observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara dengan masyarakat dan pengelola.

## 4. Dukungan (*Supporting*)

Dukungan dioperasionalkan sebagai bentuk pendampingan dan penguatan berkelanjutan yang dilakukan BUMDes agar kegiatan Bank Sampah dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Variabel ini diamati melalui intensitas pendampingan BUMDes dalam menyelesaikan kendala operasional, upaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti dinas terkait atau mitra usaha daur ulang, serta peran BUMDes dalam menjaga partisipasi dan motivasi masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui wawancara, observasi aktivitas pendampingan, serta telaah dokumen kerja sama dan laporan kegiatan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk catatan lapangan, lisan wawancara, pengambilan gambar atau video. Data ini diperoleh melalui proses eksplorasi dan pemaknaan peneliti terhadap konteks sosial yang diteliti, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai makna di balik fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Waruwu, 2024). Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Tahap reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, penyederhanaan, serta pengorganisasian data lapangan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terfokus, sistematis, dan bermakna. Selanjutnya, tahap penyajian data disusun dalam bentuk uraian deskriptif, skema penyajian data, maupun bentuk visual lainnya guna mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar kategori analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan sementara berdasarkan pola yang muncul, yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar validitasnya terjaga (Dewanti et al., 2021).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Fokus penelitian diarahkan pada aktivitas Bank Sampah Mahesajenar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mahesajenar. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan bank sampah, seperti pengurus bank sampah dan aparat desa, dijadikan sebagai informan penelitian sekaligus sumber data utama. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui

wawancara mendalam, observasi, serta penelusuran dokumen. Penggunaan teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan sesuai dengan konteks lapangan terhadap fenomena yang dikaji.

### 3. Informan Penelitian

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan informan dilakukan secara subyektif dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan peran strategis dan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar. Pada penelitian ini menggunakan 3 informan yaitu:

Tabel 1.1. Data Informan

No.	Nama	Alasan dipilihnya Informan ini
1.	Muhammad Khusnudin (Ketua Bank Sampah)	Dipilih karena memiliki Tanggungjawab utama dalam perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan terhadap oprasional bank smpah
2.	Didik Suasono (Pegawai BUMDes)	Dipilih karena BUMDes merupakan lembaga induk yang menaungi unit usaha bank sampah. Pegawai BUMDes dipilih untuk memberikan perspektif kelembagaan, termasuk bagaimana koordinasi, dukungan anggaran, serta kebijakan internal BUMDes memengaruhi keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar.

No.	Nama	Alasan dipilihnya Informan ini
3.	Sarji Wandoyo (Tokoh Masyarakat)	Dipilih karena memiliki pengaruh sosial dan pandangan yang representatif mengenai penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Sampah, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa yang berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan.
4.	Tumirin (Masyarakat Desa Plosojenar)	Dipilih karena dapat memberikan informasi dari sisi masyarakat pengguna layanan, termasuk persepsi terhadap manfaat ekonomi, lingkungan, serta partisipasi dalam kegiatan bank sampah.
5.	Siti (pegawai bank sampah)	Dipilih sebagai karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah dan memahami secara mendalam tata kelola, pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi dalam operasional Bank Sampah.

*Sumber : Data Primer*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan dari para informan. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menggali data secara mendalam sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, atau kondisi sosial subjek penelitian di lingkungan alami mereka. Dalam observasi,

peneliti dapat berperan sebagai pengamat pasif maupun aktif, tergantung pada kebutuhan penelitian. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti dapat memperoleh data yang nyata, kontekstual, dan terjadi secara langsung, sehingga meningkatkan validitas data.

b. Interview

Interview atau Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan informan guna menggali informasi secara mendalam mengenai isu atau topik yang diteliti. Wawancara bertujuan tidak hanya untuk memperoleh data primer, tetapi juga untuk mengklarifikasi atau membuktikan informasi yang sebelumnya diperoleh melalui teknik lain, seperti observasi atau dokumentasi. Seiring perkembangan teknologi, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media komunikasi daring, tergantung pada kondisi dan aksesibilitas informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pemanfaatan dokumen atau arsip yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan resmi, surat keputusan, laporan kegiatan, foto, video, atau arsip lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi, serta berperan penting dalam proses validasi data melalui triangulasi. Keunggulan metode dokumentasi terletak pada sifat datanya yang objektif, telah tersedia, dan tidak mengganggu aktivitas subjek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis dalam mengolah dan mengkaji data guna menemukan pola, hubungan, serta informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta menyusun kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, analisis

data tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk menafsirkan makna sosial di balik data yang diperoleh. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan data), penyajian data dalam bentuk naratif atau visual, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan (Spradley & Huberman, 2024).

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis untuk menata, mengelola, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna membangun pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Muhadjir, 2000). Sedangkan menurut Moleong (2002) analisis data mencakup pengurutan data, pengorganisasian ke dalam pola atau kategori, dan penyusunan uraian yang relevan. Proses ini berlangsung sejak awal pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh utuh dan bermakna (Rahmani et al., 2025). Mengacu pada pendapat Ulber Silalahi (2009), kegiatan analisis terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan ini tidak berjalan secara linier, melainkan membentuk siklus yang saling memengaruhi, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data. Dengan demikian, analisis data menjadi proses reflektif yang berperan penting dalam menghasilkan temuan penelitian yang valid dan bermakna (Nurdewi, 2022).

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pengurus Bank Sampah Mahesajenar di Desa Plosojenar. Data yang diperoleh, seperti tanggapan, saran, kritik, dan rekomendasi terhadap pengelolaan bank sampah, akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis ini mengacu pada tahapan model interaktif Ulber Silahi, yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari lapangan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Data yang banyak dan

kompleks disaring untuk memperoleh inti informasi yang bermakna. Pada tahap ini, peneliti mulai mengorganisasi data dalam bentuk tema, kategori, atau pola berdasarkan wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dibaca, seperti narasi, tabel, matriks, grafik, atau bagan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti memahami alur informasi, hubungan antar-kategori, dan pola-pola penting dalam data. Ini membantu peneliti mengidentifikasi masalah, membuat interpretasi, serta menyusun argumen atau kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Ini adalah tahap di mana peneliti membuat interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, kemudian menarik kesimpulan sementara yang terus diuji dan diverifikasi berdasarkan data lain. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi, diskusi dengan informan, atau peninjauan ulang data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan data yang berbeda. Tujuan penggunaan triangulasi adalah untuk meningkatkan validitas data serta memperkuat kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan memastikan adanya konsistensi informasi yang diperoleh peneliti (Wardatun & Khadavi, 2025).

Dalam penelitian ini, bentuk triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara



membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Bank Sampah Mahesajenar, seperti pengurus BUMDes Mahesajenar, pengelola Bank Sampah Mahesajenar, pemerintah desa, serta masyarakat atau anggota bank sampah. Informasi yang diperoleh dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian pandangan terkait peran BUMDes, bentuk dukungan yang diberikan, mekanisme pengelolaan bank sampah, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan partisipasi masyarakat.

